

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Informatika. Variabel Kepercayaan Publik penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis sentimen yang kemudian dikonversi ke dalam rentang kriteria analisis sentimen positif terhadap rangka kepercayaan publik dan dilakukan evaluasi hasil analisis menggunakan Naïve Bayes Classification dengan bantuan *software Jupyter Notebook*. Hasil analisis sentimen dalam pembahasan didapatkan kesimpulan:

1. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika ada pada tingkat yang rendah. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil analisis sentimen pada media sosial twitter yang memiliki sentimen positif sebesar 38.05% yang berarti tingkat kepercayaan publik berada pada rentang kriteria rendah dengan mutu kepercayaan D dengan nilai *accuracy* yang didapat dari evaluasi hasil *naive bayes classification* sebesar 79%. Artinya, semakin rendah jumlah sentimen positif, maka tingkat kepercayaan publik semakin rendah dan sebaliknya.

2. Dari variabel tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika, indikator yang memiliki tingkat analisis sentimen positif paling rendah ada pada indikator tingkat kepercayaan pada kebijakan pemerintah yaitu memiliki presentase sebesar 30.9% dengan nilai *accuracy* yang didapat dari evaluasi hasil *naive bayes classification* sebesar 79%. Dengan hasil *wordcloud* dalam sentimen negatif menunjukkan masyarakat tidak setuju dengan kebijakan PSE yang dibuat oleh KOMINFO sebab kebijakan tersebut dirasa merugikan masyarakat dan kemampuan KOMINFO hanya melakukan pemblokiran terhadap PSE yang menyebabkan masyarakat berpendapat untuk melakukan pemblokiran terhadap KOMINFO.

5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka implikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika dirasa gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga partisipasi publik rendah dalam kebijakan dan agenda Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan kritikan dari masyarakat untuk memblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika

2. Kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik bersifat otoriter dengan melakukan upaya pemblokiran dan pembatasan situs internet dan aplikasi. Keberadaan regulasi ini tidak hanya merugikan penyedia layanan digital, namun turut mengancam sistem demokrasi sebab, kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi, dan data masyarakat diruang digital.
3. Kegagalan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlihat dari *reshuffle* Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Johnny G. Plate dikarenakan adanya kasus korupsi yang terjadi. Seperti hasil analisis wordcloud yang didapatkan pada indikator Pejabat Publik pada penelitian ini, kasus tersebut sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat di twitter sejak Juni 2022-Januari 2023.

